

INDIKATOR PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH : TINJAUAN TEORITIS DAN EMPIRIS

by Tim Penulis

Submission date: 01-Jul-2021 02:40PM (UTC+0700)

Submission ID: 1614488809

File name: Buku_INDIKATOR-halaman-1-14,57-91_Bab_2.pdf (1.42M)

Word count: 7406

Character count: 48802

**INDIKATOR PEMBANGUNAN
EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH :
TINJAUAN TEORITIS DAN EMPIRIS**

1

**Sanksi pelanggaran Pasal 72
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002
Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997
Pasal 44 Tentang Hak Cipta**

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait, sebagaimana dimaksud ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

**INDIKATOR PEMBANGUNAN
EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH :
TINJAUAN TEORITIS DAN EMPIRIS**

Tim Penulis



INDIKATOR PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH : TINJAUAN TEORITIS DAN EMPIRIS

Tim Penulis

1

UPT. Penerbit dan Percetakan
Universitas Sriwijaya 2021
Kampus Unsri Palembang
Jalan Srijaya Negara, Bukit Besar Palembang 30139
Telp. 0711-360969
email : unsri.press@yahoo.com, penerbitunsri@gmail.com
website : www.unsri.unsripress.ac.id

Anggota APPTI No. 026/KTA/APPTI/X/2015
Anggota IKAPI No. 001/SMS/2009

Setting cover: Anggita Feisabella Rizanti
Setting & Lay Out Isi : Devi
Cetakan Pertama, Januari 20**1**
xiv + 252 halaman : 16 x 24 **cm**

Hak cipta dilindungi undang-undang.
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun,
baik secara elektronik maupun mekanik, termasuk memfotokopi, merekam, atau
dengan menggunakan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Hak Terbit Pada Unsri Press

ISBN : 978-979-587-913-8

KATA SAMBUTAN

Syukur Alhamdulillah atas berkat rahmat Allah SWT, dan karunia-Nya penyusunan buku yang berjudul “Indikator Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah: Tinjauan Teoritis dan Empiris” dapat terselesaikan. Saya selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya menyambut dengan baik dan penuh rasa syukur atas terbitnya buku ini. Adanya buku ini merupakan suatu kehormatan dan



Prof. Dr. Mohamad Adam, S.E., M.E.,
Dekan Fakultas Ekonomi,
Universitas Sriwijaya

kebanggaan bagi saya karena melalui buku ini Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya dapat diperkenalkan. Buku “Indikator Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah: Tinjauan Teoritis dan Empiris” merupakan hal penting, karena buku ini dapat menjadi sumber informasi mengenai pengukuran dalam menganalisis berbagai indikator Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah dan dilengkapi dengan berbagai tinjauan Pustaka baik teoritis maupun empiris. Pada kesempatan ini, saya haturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam proses penyusunan buku ini, yang telah memberikan bantuan baik secara moral maupun materil.

Akhir kata, semoga buku “Indikator Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah: Tinjauan Teoritis dan Empiris” bermanfaat bagi kita semua.

Indralaya, Januari 2021

Dekan Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya

Prof. Dr. Mohamad Adam, S.E., M.E.

KATA PENGANTAR

Pembangunan ekonomi merupakan hal penting yang harus diperhitungkan karena pembangunan ekonomi mengindikasikan keberhasilan suatu negara. Pembangunan ekonomi dapat dilihat melalui pertumbuhan ekonomi, yang mana kualitas pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Untuk mendorong pembangunan ekonomi daerah dapat menggunakan otonomi daerah sebagai cara terbaik, karena kemandirian dalam melaksanakan pembangunan dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

Buku ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu pada bagian pertama menyajikan berbagai pengukuran yang digunakan untuk menganalisis pembangunan ekonomi dan kinerja keuangan daerah. Penyajiannya secara ringkas meliputi konsep dan defenisi dasar, formulasi dan contoh perhitungan yang dilengkapi dengan contoh data dan interpretasinya. Pada bagian kedua, buku ini menyajikan berbagai tinjauan literatur baik secara teoritis maupun empiris yaitu lingkungan dan pembangunan, upah tenaga kerja, aglomerasi industri, efisiensi perbankan, perkembangan inklusi keuangan, struktur ekonomi serta keuangan desa.

Buku ini terdiri dari 8 bab, bab 1 membahas mengenai analisis ekonomi daerah yang menyajikan informasi tentang dasar-dasar ekonomi wilayah serta perhitungan PDRB juga produktivitas ekonomi. Pada bab 2 membahas mengenai analisis keuangan daerah yang meliputi konsep keuangan daerah, komposisi APBD serta

penilaian kinerja keuangan daerah. Bab 3 membahas mengenai lingkungan dan pembangunan, yang meliputi hubungan antara lingkungan dan pembangunan, pembangunan berkelanjutan serta kebijakan yang digunakan untuk melakukan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Bab 4 membahas mengenai determinan dan struktur upah pekerja.

Pada bab 5 membahas mengenai potensi aglomerasi industri kecil di Sumatera Selatan baik ditinjau dari skala ekonomi, biaya bahan baku dan pemasaran serta upah pekerja. Bab 6 menyajikan informasi mengenai efisiensi perbankan. Bab 7 membahas mengenai perkembangan inklusi keuangan Sumatera Selatan. Bab 8 membahas mengenai dana desa serta kontribusinya terhadap pengurangan kemiskinan dan perkembangan wilayah.

Buku ini dikemas sedemikian rupa agar dapat memudahkan para pembaca dalam memahami Indikator Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah. Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dan membantu proses penyusunan buku ini, yang telah bersedia menyumbangkan ide, pikiran, waktu dan tenaga sehingga pada akhirnya buku ini dapat selesai dan diterbitkan. Akhir kata, semoga buku ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Palembang, Januari 2021

Penulis

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	v
KATA PENGANTAR	vii
BAB I Analisis Ekonomi Daerah	
Imelda, M. Deassy Apriani, Anggita Feisabella Rizanti, Mega Debiyanti.....	1
BAB II Analisis Keuangan Daerah	
Azwardi, Imelda, Kurnia Sari, Nadiya Angraini	43
BAB III Lingkungan dan Pembangunan	
Abdul Bashir, Mukhlis, Bambang Bemby Soebyakto, Ichsan Hamidi	79
BAB IV Upah Pekerja: Determinan dan Struktur	
Yunisvita	103
BAB V Aglomerasi Industri: Telaah Prospek Untuk Industri Kecil di Sumatera Selatan	
Mukhlis, Bernadette Robiani, Dirta Pratama Atiyatna, Hamira	151
BAB VI Efisiensi Perbankan	
Suhel	181
BAB VII Perkembangan Inklusi Keuangan Sumatera Selatan	
Sri Andaiyani dan Ariodillah Hidayat	217
BAB VIII Dana Desa: Perspektif Pengentasan Kemiskinan dan Pengembangan Wilayah	
Sukanto, Azwardi, Wika Indriyani	227

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Contoh PDB Indonesia Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2019....	7
Tabel 1.2 Contoh PDB Indonesia Atas Harga Berlaku dan Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Tahun 2007-2019	9
Tabel 1.3 Jumlah Penduduk dan PDRB Kota Palembang	11
Tabel 1.4 PDRB Provinsi Lampung dan PDRB Kota Bandar Lampung	16
Tabel 1.5 Contoh Struktur PDB Indonesia Menurut Lapangan Usaha (%) tahun 2015-2019	18
Tabel 1.6 Tahapan pembangunan dan Kontribusi Sektoral terhadap PDB	19
Tabel 1.7 Kriteria Tipologi Klassen Perkembangan Ekonomi Wilayah	28
Tabel 1.8 Perhitungan Tipologi Klassen Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018	29
Tabel 1.9 Kriteria Tipologi Klassen Perkembangan Ekonomi Wilayah	30
Tabel 1.10 Kriteria Tipologi Klassen untuk Klasifikasi Kinerja Sektor I di suatu Wilayah	31
Tabel 2.1 Komposisi Penerimaan dan Pengeluaran Daerah	50
Tabel 2.2 Perkembangan APBD dan Jumlah Penduduk Provinsi Se-Sumbagsel Tahun 2018-2019	55
Tabel 2.3 Perhitungan Rasio Pertumbuhan APBD untuk Provinsi Se-Sumbagsel	56

Tabel 2.4 Perbandingan Rata-rata Rasio Pertumbuhan APDB dan Rata-rata Rasio APBD Per Kapita di Provinsi Se-Sumbagsel Tahun 2019	58
Tabel 2.5 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah dan Total Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumbagsel Tahun 2019 (Dalam Rupiah)	60
Tabel 2.6 Klasifikasi Indeks Kemandirian Wilayah	62
Tabel 2.7 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Provinsi Se-Sumbagsel Tahun 2019 (Dalam Rupiah)	63
Tabel 2.8 Penghitungan Elastitas PAD Provinsi Lampung Tahun 2018-2019	65
Tabel 2.9 Penghitungan Share PAD Provinsi Lampung Tahun 2019	66
Tabel 2.10 Penghitungan Growth PAD Provinsi Lampung Tahun 2018-2019 (Rupiah)	66
Tabel 2.11 Perbandingan rata-rata <i>share</i> PAD dan <i>Growth</i> PAD Provinsi Se-Sumbagsel Tahun 2019	67
Tabel 2.12 Klasifikasi Kinerja Pembiayaan Pembangunan Wilayah	70
Tabel 2.13 Perkembangan Belanja Pembangunan dan Total Belanja Daerah Provinsi Se-Sumbagsel Tahun 2019 (Dalam Rupiah)	70
Tabel 2.14 Klasifikasi Rasio Efektifitas	72
Tabel 2.15 Klasifikasi Rasio Efisiensi	73

Tabel 2.16 Perhitungan Rasio Efektivitas Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017-2019	73
Tabel 2.17 Perhitungan Rasio Efisiensi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017-2019 (Rupiah)	74
Tabel 2.18 Perhitungan Rasio Belanja Pembangunan Terhadap APBD Provinsi Se-Sumbagsel Tahun 2019 (Dalam Rupiah) ..	75
Tabel 5.1 Indikator Potensi Aglomerasi Industri Kecil di Provinsi Sumatera Selatan	171
Tabel 7.1 Hasil Perhitungan Indeks Inklusi Keuangan di Sumatera Selatan	223
Tabel 8.1 Perkembangan Tipologi Desa di Indonesia Tahun 2015 dan 2020	243
Tabel 8.2 Perkembangan Tipologi Desa di Regional Sumatera 2018 dan 2020	244

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Pengelolaan Keuangan Daerah	45
Gambar 2.2 Tipologi Kinerja APBD	57
Gambar 2.3 Tipologi Kinerja APBD Provinsi Se-Sumbagsel Tahun 2019	58
Gambar 2.4 Kriteria Share and Growth	65
Gambar 2.5 Analisa Kriteria Share and Growth Provinsi Lampung Tahun 2018-2019	68
Gambar 3.1 Hubungan antara Degradasi Lingkungan dan Pembangunan	87
Gambar 3.2 Konsep Pembangunan Berkelanjutan	91
Gambar 4.1 Upah Rata-rata per Jam berdasarkan tingkat Pendidikan Pekerja	141
Gambar 4.2 Upah Rata-rata per Jam berdasarkan Gender Pekerja ..	142
Gambar 4.3 Rata-rata Upah Laki-laki Berdasarkan Jenis Pekerjaan Utama	143
Gambar 4.4 Rata-rata Upah Perempuan Berdasarkan Jenis Pekerjaan Utama	143
Gambar 5.1 Pertumbuhan Industri Kecil di Indonesia	152
Gambar 5.2 Pangsa IK terhadap PDB Harga Berlaku Indonesia, 2019	152
Gambar 5.3 Pangsa IK terhadap PDB Harga Konstan Indonesia 2019	152
Gambar 5.4 Perkembangan Unit Usaha Industri Kecil di Sumatera Selatan, 2009-2019	153

Gambar 5.5 Jumlah Tenaga Kerja Industri Kecil di Sumatera Selatan 2009-2019	154
Gambar 5.6 Dukungan Skala Ekonomi terhadap Potensi Aglomerasi Industri Kecil di Provinsi Sumatera Selatan	163
Gambar 5.7 Sistem Pengupahan pada Industri Kecil di Provinsi Sumatera Selatan	165
Gambar 5.8 Dukungan Upah terhadap Potensi Aglomerasi Industri Kecil di Provinsi Sumatera Selatan	165
Gambar 5.9 Dukungan Biaya Bahan Baku dan Pemasaran terhadap Potensi Aglomerasi Industri Kecil di Provinsi Sumatera Selatan	167
Gambar 6.1 Efisiensi Teknik dan Efisiensi Alokatif	184
Gambar 6.2 Kerangka Konseptual Efisiensi Perbankan	187
Gambar 8.1 Tren Kemiskinan di Indonesia Tahun 2015-2020 (Persen)	230
Gambar 8.2 Rincian Dana Desa Tahun 2015-2020 (Triliun Rupiah)	231
Gambar 8.3 Sebaran Koefisien Dana Desa terhadap Kemiskinan di Provinsi Banten	240
Gambar 8.4 Sebaran Koefisien Dana Desa terhadap Kemiskinan di kabupaten Muara Enim	241

BAB II

ANALISIS KEUANGAN DAERAH

Oleh:

Azwardi, Imelda, Kurnia Sari, Nadiya Angraini

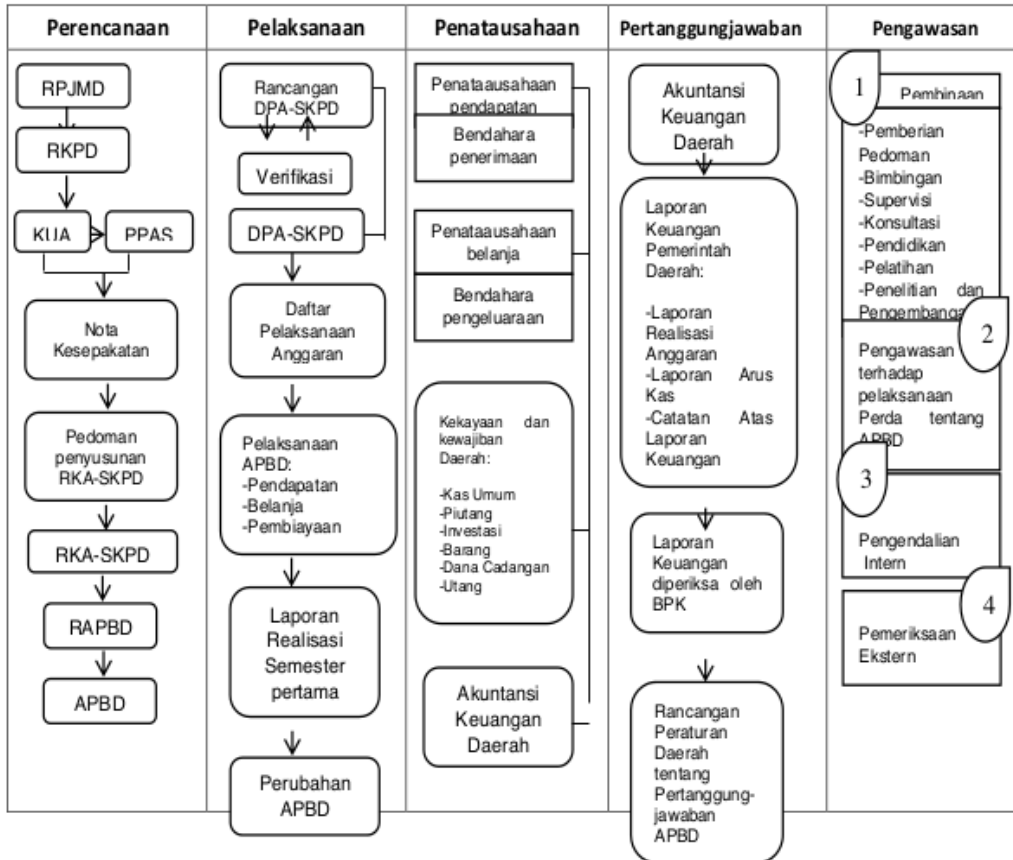
2.1 Konsep dan Definisi Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, keuangan merupakan faktor yang penting dalam melihat tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah sehingga pemerintah daerah seharusnya menjalankan fungsi dan peranan secara efisien terutama mengelola keuangan daerahnya. Pemerintah daerah harus melakukan upaya untuk menghasilkan APBD yang dapat mencerminkan kebutuhan riil masyarakat sesuai dengan potensi masing-masing daerah serta dapat memenuhi tuntutan terciptanya anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan dan akuntabilitas publik. Menurut Nataluddin (2001), dua isu utama yang berkaitan dengan implikasi keuangan daerah terhadap otonomi daerah, yaitu:

1. Kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya.
2. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan

keuangan pusat dan daerah sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar.

Halim (2012) menyatakan bahwa keuangan daerah merupakan hak serta kewajiban yang dinilai dengan uang, dan segala sesuatu yang berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah selama belum dikuasai atau dimiliki oleh negara maupun daerah yang lebih tinggi maupun pihak lain sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku. Sedangkan kinerja yang menggunakan ukuran indikator keuangan disebut kinerja keuangan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 1 ayat 1, menyebutkan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pasal 1 ayat 2 menyatakan pengelolaan keuangan daerah adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.



Sumber: Mardiasmo (2005)

Gambar 2.1. Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Pasal 66 Ayat 1 mengatakan bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan dan manfaat untuk masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dengan pendekatan kinerja yang berorientasi pada output dengan menggunakan konsep nilai uang atau *value for money* serta prinsip tata pemerintahan yang baik atau *good governance*.

Akan tetapi, pengelolaan keuangan pemerintah daerah otonom secara umum belum dijalankan fungsi dan peranannya secara efisien. Situasi ini muncul karena pendekatan umum yang digunakan adalah pendekatan ikremental, dimana pendekatan ini digunakan dalam penentuan besarnya alokasi dana untuk setiap kegiatan. Pendekatan ikremental didasarkan pada perubahan satu atau lebih variabel yang bersifat umum, misalnya jumlah penduduk atau pertumbuhan ekonomi atau laju inflasi. Selain pendekatan ikremental, digunakan juga pendekatan lain misalnya pendekatan *line-item budget* yaitu perencanaan anggaran yang didasarkan pada pos anggaran yang sudah ada sebelumnya. Pada pendekatan ini, pemerintah daerah tidak menghilangkan satu atau lebih pos pengeluaran yang ada meskipun pos pengeluaran tersebut sebenarnya secara riil tidak dibutuhkan oleh unit kerja yang bersangkutan.

Perencanaan pengeluaran yang kurang memadai tersebut akhirnya menimbulkan kemungkinan *underfinancing* atau *overfinancing*. Keduanya akan mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektivitas unit-unit kerja pemerintah daerah (Halim, 2017). Masalah utama yang dihadapi oleh unit kerja yang mengalami *underfinancing* adalah rendahnya kapabilitas program kerja dalam pemenuhan kebutuhan dan tuntutan public. Sedangkan unit kerja yang mengalami *overfinancing* adalah efisiensi yang rendah. Situasi tersebut dapat menyebabkan layanan publik dijalankan secara tidak efisien dan kurang sesuai dengan tuntutan publik, sementara dana yang ada pada anggaran keuangan merupakan dana publik. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut cenderung membuat peran pemerintah daerah

semakin lemah dalam hal sebagai stimulator, fasilitator, koodinator dan entrepreneur dalam proses pembangunan daerah.

2.2 Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Aspek keuangan dan fiskal menjadi modal dasar yang perlu diperhatikan yang tercermin dari Anggaran Daearah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD adalah alat atau instrumen kebijakan untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, sebagai alat bantu pengambilan keputusan perencanaan pembangunan dan alat otoritas pengeluaran di masa yang akan datang.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun 2015 Pasal 1 ayat 1, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan suatu anggaran daerah yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secar rinci.
2. Adanya sumber penerimaan yang menjadi target minimal untuk menutupi biaya terkait aktivitas tersebut dan adanya biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran yang dilaksanakan.
3. Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka.
4. Periode anggaran adalah satu tahun.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006, APBD memiliki beberapa fungsi diantaranya:

1. Fungsi Otorisasi: anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
2. Fungsi Perencanaan: anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3. Fungsi Pengawasan: anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Fungsi Alokasi: anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
5. Fungsi Distribusi: kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
6. Fungsi Stabilisasi: anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian

APBD dapat digunakan sebagai indikator hubungan fiskal antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat serta mengukur kreativitas dan kemandirian pemerintah daerah khususnya dalam pembiayaan pembangunan. Pemerintah pusat menjadikan APBD khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai kriteria utama dalam pemberian otonomi kepada daerah, sehingga menuntut kreativitas pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi sumberdaya dan ekonomi wilayah.

Struktur dan komposisi dalam APBD terdiri dari aspek pendapatan dan pengeluaran. Pendapatan daerah adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak milik daerah. Pengeluaran daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu. Sedangkan belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah.

1. Pendapatan Daerah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sumber-sumber penerimaan daerah terdiri dari 4 bagian yakni:

- 1). Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bersumber dari:
 - a. Pajak Daerah
 - b. Retribusi Daerah
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
 - d. Lain-lain PAD yang sah.
- 2). Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004, Dana perimbangan terdiri atas:

- a. Dana Bagi Hasil, bersumber dari pajak dan sumberdaya alam. Dana bagi hasil yang bersumber dari pajak terdiri atas: Pajak Bumi dan bangunan (PBB), Bea Perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTP), Pajak Penghasilan (PPh).
- b. Dana Alokasi Umum (DAU), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
- c. Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Selengkapnya komposisi penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1. Komposisi Penerimaan dan Pengeluaran Daerah

No.	Sumber Penerimaan Daerah (Pendapatan Daerah)	No.	Pengeluaran Daerah
A.	PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.1 Pajak Daerah 1.2 Retribusi Daerah 1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan 1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	A.	1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.1 Belanja Pegawai 1.2 Belanja Bunga 1.3 Belanja Subsidi 1.4 Belanja Hibah 1.5 Belanja Bantuan Sosial 1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Prov/Kab/Kota/Pemerintah Desa

			1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Prov/Kab/Kota/Pemerintah Desa 1.8 Belanja Tidak Terduga
B.	DANA PERIMBANGAN 2.3 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 2.3.1 Bagi Hasil Pajak 2.3.2 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 2.4 Dana Alokasi Umum (DAU) 2.5 Dana Alokasi Khusus (DAK)	B.	2. BELANJA LANGSUNG 1.1 Belanja Pegawai 1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.3 Belanja Modal Total Belanja Daerah = Belanja Langsung + Belanja Tak Langsung
C.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 3.1 Pendapatan Hibah 3.2 Dana Darurat 3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dan Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.	C.	BELANJA MENURUT FUNGSI (BELANJA PEMBANGUNAN) 1. Pelayanan Umum 2. Ketertiban dan Keamanan 3. Ekonomi (sektoral) 4. Lingkungan Hidup 5. Perumahan dan Fasilitas Umum 6. Kesehatan 7. Pariwisata dan Budaya 8. Pendidikan 9. Perlindungan Sosial
D.	PINJAMAN DAERAH Pinjaman dalam negeri Pinjaman luar negeri		
	Pendapatan Daerah = (A + B + C + D)		Pengeluaran Daerah = (A + B + C)
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan (E)		= Pendapatan - Pengeluaran

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Keterangan lebih rinci dari masing-masing komponen dapat dipelajari dalam UU No. 23 tahun 2014 dan UU No. 32 Tahun 2004, serta PP No. 12 Tahun 2019.

Data komposisi APBD tersebut memberikan manfaat untuk berbagai analisis (Muta'ali, 2015), diantaranya yaitu:

1. Penilaian tingkat kemandirian daerah dalam pembiayaan pembangunan;
2. Kinerja penyelenggaraan otonomi daerah;
3. Menilai efektivitas dan efisiensi dalam pendapatan dan belanja daerah;
4. Menilai kinerja penyelenggaraan pembangunan khususnya alokasi biaya pembangunan untuk sektor-sektor pembangunan
5. Menilai peran daerah dalam menggali potensi sumber-sumber pendapatan dalam pembentukkan pendapatan daerah;
6. Melihat pertumbuhan/perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

2.3 Kinerja Keuangan Daerah

Kemampuan daerah dalam pembiayaan pembangunan merupakan ² pilar penting dalam pembangunan dan otonomi daerah, sehingga jika kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan pembiayaannya (Pendapatan Asli Daerah) dijadikan sebagai instrument dalam menilai keberhasilan otonomi.

Analisis kinerja keuangan dilakukan untuk penilaian kinerja di masa lalu dengan melakukan analisis sehingga didapatkan posisi keuangan yang mewakili realitas dari entitas dan potensi-potensi

kinerja yang akan berlanjut. Dengan melaksanakan analisis rasio terhadap APBD yang telah ditetapkan maka indikator ini dapat digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah. Sebenarnya belum ada kesepakatan secara umum mengenai nama dan kaidah pengukuran dari rasio keuangan, hal ini dikarenakan analisis rasio yang dilakukan pada sektor publik terhadap APBD belum banyak dilakukan. Namun dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien serta akuntabel maka analisis rasio terhadap APBD perlu dilakukan meskipun kaidah pengakuntasian dalam APBD berbeda dengan keuangan yang dimiliki oleh sektor swasta (Halim, 2012).

Dengan menggunakan struktur APBD dapat disusun serangkaian ukuran kuantitatif kinerja keuangan dan pembangunan daerah yang mendasarkan pada prinsip-prinsip otonomi dan kemandirian penyelenggaraan pembangunan daerah. analisa struktur keuangan daerah pada sisi pendapatan dapat digunakan untuk melihat kapasitas fiskal dan kemandirian daerah serta kinerja otonomi daerah. sedangkan pada sisi pengeluaran atau pembelanjaan dapat diukur efektifitas dan kinerja pembangunan daerah.

Penilaian kinerja keuangan daerah untuk daerah otonom sangat berbeda dengan penilaian kinerja keuangan perusahaan. Keuangan pemerintah daerah berbasis anggaran dan tidak memiliki tujuan untuk memaksimalkan keuntungan (profit). Meskipun ada istilah surplus atau defisit untuk pendapatan dan belanja. Surplus dan defisit tersebut menunjukkan sebuah “muara” dari “komitmen” atau “kesepakatan” antara eksekutif dengan legislatif (DPRD) dalam satu tahun anggaran.

Menurut Halim (2012) pihak-pihak yang berkepentingan dengan rasio keuangan pada APBD terdiri dari:

1. DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)
2. Badan Eksekutif
3. Investor, Kreditor dan Donatur
4. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi
5. Masyarakat

Adapun tujuan pengukuran kinerja menurut Putra (2018) yaitu:

1. Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik.
2. Untuk mengukur kinerja finansial dan nonfinansial secara berimbang.
3. Untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan bawahh serta memotivasi untuk mencapai kesesuaian tujuan.
4. Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional.

Halim (2012) menyatakan bahwa terdapat beberapa rasio keuangan yang dikembangkan dalam organisasi pemerintah yaitu rasio kemandirian, rasio efisiensi PAD, rasio efektivitas PAD, rasio aktivitas, *debt service coverage ratio* dan rasio pertumbuhan. Menurut penelitian Sularso dan Restianto (2011) indikator ukuran kinerja keuangan meliputi derajat desentralisasi, tingkat ketergantungan keuangan, rasio kemandirian keuangan, rasio efektivitas, rasio

efisiensi, rasio keserasian, *debt service coverage ratio* dan rasio pertumbuhan.

Berikut formulasinya dapat disusun sebagai berikut:

1. Kinerja APBD

Untuk menganalisa kinerja APBD dapat diformulasikan dalam bentuk rasio yaitu membandingkan dengan perkembangan jumlah penduduk dan pertumbuhan APBD dari tahun ke tahun. Formulasi kinerja keuangan daerah atau APBD dirumuskan sebagai berikut:

1). APBD per kapita adalah rasio APBD dengan jumlah penduduk

$$\text{Rasio APBD dan penduduk} = \frac{\text{APBD (Rp)}}{\text{Jumlah Penduduk}}$$

Tabel 2.2. Perkembangan APBD dan Jumlah Penduduk Provinsi Se-Sumbagsel Tahun 2018-2019

Provinsi	APBD (Juta Rupiah)		Jumlah Penduduk (Jiwa)		Rasio APBD Per Kapita	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Jambi	4,412,464	4,575,192	3,570,272	3,624,579	1.24	1.26
Sumatera Selatan	9,141,371	9,280,742	8,391,489	8,470,683	1.09	1.10
Bengkulu	2,851,808	2,934,057	1,963,262	1,991,793	1.45	1.47
Lampung	7,098,983	7,266,993	8,370,467	8,447,672	0.85	0.86
Bangka belitung	2,556,977	2,694,205	1,459,873	1,488,792	1.75	1.81

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Badan Pusat Statistik

Pada Tabel 2.2 dapat dilihat bahwa selama 2 tahun terakhir, Provinsi Bangka Belitung memiliki Rasio APBD Per Kapita yang paling tinggi. Sedangkan provinsi yang memiliki APBD per kapita terendah adalah Provinsi Lampung.

2). Rasio Pertumbuhan APBD

Rasio pertumbuhan (*Growth Ratio*) APBD mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya. Rasio pertumbuhan APBD diperoleh dengan mengurangi realisasi penerimaan APBD tahun sekarang dengan realisasi penerimaan APBD tahun sebelumnya kemudian dibagi dengan realisasi penerimaan APBD tahun sebelumnya.

$$P_{APBD} = \frac{(APBD_t - APBD_{(t-1)})}{APBD_{(t-1)}}$$

Keterangan:

P_{APBD} = Rasio pertumbuhan APBD

$APBD_t$ = APBD pada tahun t

$APBD_{t-1}$ = APBD pada tahun t-1

Tabel 2.3. Perhitungan Rasio Pertumbuhan APBD untuk Provinsi Se-Sumbagsel

Provinsi	APBD (Juta Rupiah)		Rasio Pertumbuhan APBD
	2018	2019	
Jambi	4,412,464	4,575,192	0.037
Sumatera Selatan	9,141,371	9,280,742	0.015
Bengkulu	2,851,808	2,934,057	0.029
Lampung	7,098,983	7,266,993	0.024
Bangka belitung	2,556,977	2,694,205	0.054

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Pada Tabel 2.3 dapat dilihat bahwa selama 2 tahun terakhir, Provinsi Sumatera Selatan memiliki Rasio pertumbuhan APBD terendah. Hal ini mengindikasikan selama 2 tahun terakhir Pertumbuhan APBD Provinsi Sumatera Selatan hanya meningkat sebesar 15 persen. Sedangkan Provinsi yang memiliki Rasio pertumbuhan APBD tertinggi adalah Provinsi Bangka Belitung.

3). **Tipologi Kinerja APBD**

Berdasar analisa rasio APBD per kapita dan rasio pertumbuhan APBD, maka dapat disusun Kinerja APBD di suatu wilayah yang diformulasikan dalam gambar tipologi berikut:

Rasio Pertumbuhan APBD	Rasio APBD/Kapita	
	> rata-rata APBD/Kapita	< rata-rata APBD/Kapita
> rata-rata rasio pertumbuhan	APBD Besar Tumbuh	APBD Kecil Tumbuh
< rata-rata rasio pertumbuhan	APBD Besar Stagnan	APBD Kecil Stagnan

Sumber: Muta'ali (2015)

Gambar 2.2. Tipologi Kinerja APBD

Menurut model tipologi tersebut, APBD dibagi menjadi 4 (empat) klasifikasi:

1. APBD besar tumbuh, merupakan APBD yang memiliki rasio APBD/kapita dan tingkat pertumbuhan di atas rata-rata.
2. APBD besar stagnan, merupakan APBD yang memiliki rasio APBD/kapita di atas rata-rata, namun tingkat pertumbuhan di bawah wilayah rata-rata wilayah kajian.

3. APBD kecil tumbuh, merupakan APBD yang memiliki rasio APBD/kapita di bawah rata-rata, namun tingkat pertumbuhan di atas wilayah rata-rata wilayah kajian.
4. APBD kecil stagnan, merupakan APBD yang memiliki rasio APBD/kapita dan tingkat pertumbuhan di bawah rata-rata.

Tabel 2.4. Perbandingan Rata-rata Rasio Pertumbuhan APBD dan Rata-rata Rasio APBD Per Kapita di Provinsi Se-Sumbagsel Tahun 2019.

Provinsi	Rasio Pertumbuhan APBD	Analisa	Rasio APBD Per Kapita	Analisa
Jambi	0.037	<rata-rata rasio pertumbuhan	1.26	>rata-rata APBD/kapita
Sumatera Selatan	0.015	>rata-rata rasio pertumbuhan	1.10	>rata-rata APBD/kapita
Bengkulu	0.029	>rata-rata rasio pertumbuhan	1.47	<rata-rata APBD/kapita
Lampung	0.024	>rata-rata rasio pertumbuhan	0.86	>rata-rata APBD/kapita
Bangka belitung	0.054	<rata-rata rasio pertumbuhan	1.81	<rata-rata APBD/kapita
Rata-rata	0.032		1.30	

Sumber: DJPK, data diolah 2020

Rasio Pertumbuhan APBD	Rasio APBD/Kapita	
	> rata-rata APBD/Kapita	< rata-rata APBD/Kapita
> rata-rata rasio pertumbuhan	APBD Besar Tumbuh Sumatera Selatan Lampung	APBD Kecil Tumbuh Bengkulu
< rata-rata rasio pertumbuhan	APBD Besar Stagnan Jambi	APBD Kecil Stagnan Bangka Belitung

Sumber: data diolah, 2020.

Gambar 2.3. Tipologi Kinerja APBD Provinsi Se-Sumbagsel Tahun 2019

Berdasarkan kuadran tipologi kinerja APBD di atas, diketahui bahwa Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Lampung berada pada kuadran APBD Besar tumbuh. Hal ini mengindikasikan bahwa rasio APBD/kapita dan tingkat pertumbuhan wilayah Provinsi Sumatera Selatan berada di atas rata-rata wilayah. Provinsi Jambi berada pada kuadran APBD Besar Stagnan. Hal ini mengindikasikan bahwa rasio APBD/kapita Provinsi Jambi di atas rata-rata, namun tingkat pertumbuhan di bawah rata-rata wilayah. Provinsi Bengkulu berada pada kuadran APBD Kecil Tumbuh. Hal ini mengindikasikan rasio APBD/kapita Provinsi Bengkulu di bawah rata-rata, namun tingkat pertumbuhan di atas rata-rata wilayah. Sedangkan Provinsi Bangka Belitung berada pada kuadran APBD Kecil Stagnan, maksudnya rasio APBD/kapita dan tingkat pertumbuhan Provinsi Bangka Belitung di bawah rata-rata wilayah.

4). Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) atau Derajat Desentralisasi Fiskal

Kapasitas fiskal daerah menunjukkan tingkat otonomi fiskal yaitu kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintah daerah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Kapasitas fiskal diukur dengan formulasi berikut:

$$KFD = \frac{PAD}{TPD}$$

Keterangan:

KFD = Kapasitas Fiskal Daerah

PAD = Pendapatan Asli Daerah

TPD = Total Penerimaan Daerah

Nilai KFD antara 0-1, semakin mendekati nilai 1 (besar) maka semakin besar kemampuan fiskal daerah dan tingkat kemandirian semakin tinggi dan sekaligus ketergantungan terhadap pemerintah pusat semakin rendah.

Tabel 2.5. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah dan Total Pendapatan Asli Daerah Provinsi Se-Sumbagsel Tahun 2019
(Dalam Rupiah)

Provinsi	PAD	TPD	Nilai KFD
Jambi	1,651,089,944,335	4,575,192,849,736	0.361
Sumatera Selatan	3,494,510,853,252	9,280,742,072,449	0.377
Bengkulu	826,674,936,050	2,934,057,941,394	0.282
Lampung	3,018,067,291,160	7,266,993,438,828	0.415
Bangka belitung	826,701,095,332	2,694,205,659,655	0.307

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Laporan Realisasi Anggaran.

Pada Tabel 2.5 dapat dilihat total PAD dan TPD tertinggi adalah Provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan total PAD terendah adalah Provinsi Bengkulu dan total TPD terendah adalah Provinsi Bangka Belitung. Berdasarkan penghitungan nilai KFD, ke-5 Provinsi di Sumbagsel memiliki nilai KFD yang belum mendekati 1. Hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan fiskal daerah dan tingkat kemandirian daerah masih sangat rendah.

5). Ketergantungan Fiskal Pemerintah Daerah dan Pusat

Ketergantungan fiskal Daerah-Pusat dinyatakan dengan perbandingan antara kemampuan keuangan daerah atau PAD dengan penerimaan

daerah yang berasal dari pusat atau Dana Perimbangan. Berikut formulasinya:

$$KFDP_1 = \frac{PAD}{DP}$$

Atau

$$KFDP_2 = \frac{DP}{TPD}$$

KFDP = ketergantungan fiskal Daerah-Pusat

PAD = Pendapatan Asli Daerah

DP = Dana Perimbangan dari pusat yang terdiri dari Bagi hasil pajak, DAK dan DAU

TPD = Total Penerimaan Daerah

Nilai KFDP antara 0-1, semakin mendekati nilai 1 (besar) maka semakin kecil ketergantungan daerah terhadap pusat dan tingkat kemandirian semakin tinggi. berdasarkan rentang nilai berikut dapat dibuat klasifikasi berikut:

< 0,25 = Sangat tidak mandiri, ketergantungan terhadap pemerintah pusat

0,26-0,50 = Tidak Mandiri, Ketergantungan terhadap pusat tinggi

0,51-0,75 = Mandiri

>0,75 = Sangat Mandiri

Menurut Paul Hersey dan Kenneth Blanchard dalam Nataluddin (2001), pola hubungan keuangan pusat dan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah terdiri dari 4 pola yaitu:

a. Pola Hubungan Instruktif

Peran pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah, artinya daerah belum mampu menyelenggarakan otonomi daerah.

b. Pola Hubungan Konsultatif

Daerah sudah sedikit mampu menyelenggarakan otonomi daerah, hal ini dikarenakan campur tangan dari pemerintah pusat sudah sedikit berkurang.

c. Pola Hubungan Partisipatif

Campur tangan pemerintah pusat tidak lagi dominan, karena tingkat kemandirian daerah otonom sudah layak dan mampu melaksanakan otonomi.

d. Pola Hubungan Delekatif

Daerah sudah benar-benar mampu dan mandiri dalam penyelenggaraan otonomi daerah, hal ini dikarenakan campur tangan pemerintah sudah tidak ada lagi. Dengan kata lain, daerah otonom lah yang mendominasi pelaksanaan otonomi daerah.

Tabel 2.6. Klasifikasi Indeks Kemandirian Wilayah

Klasifikasi	Nilai KFDP	Pola Hubungan Pusat-Daerah
Sangat Tidak Mandiri	< 25.00	Instruktif
Tidak Mandiri	0,25-0,50	Konsultatif
Mandiri	0,51-0,75	Partisipatif
Sangat Tinggi	>0,75	Delekatif

Sumber: Halim (2007)

Tabel 2.7. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Provinsi Se-Sumbagsel Tahun 2019 (Dalam Rupiah)

Provinsi	PAD	DANA PERIMBANGAN	KFDP ₁
Jambi	1,651,089,944,335	2,896,753,806,401	0.57
Sumatera Selatan	3,494,510,853,252	5,698,701,179,582	0.61
Bengkulu	826,674,936,050	2,076,151,739,620	0.40
Lampung	3,018,067,291,160	2,627,195,349,110	1.15
Bangka belitung	826,701,095,332	1,742,433,563,849	0.47

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Laporan Realisasi Anggaran

Tabel 2.7 memperlihatkan bahwa total PAD dan DP tertinggi adalah Provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan total PAD terendah adalah Provinsi Bengkulu dan Total DP terendah adalah Provinsi Bangka Belitung. Berdasarkan penghitungan nilai KFDP₁, Provinsi Lampung memiliki nilai KFDP₁ yang melebihi 1, hal ini mengindikasikan bahwa Provinsi Lampung memiliki tingkat ketergantungan daerah yang rendah terhadap pemerintah pusat. Berdasarkan klasifikasi indeks kemandirian wilayah, pola hubungan yang terjadi di Provinsi Lampung adalah pola hubungan delegatif yang berarti daerah otonom telah mendominasi pelaksanaan otonomi daerah karena campur tangan pemerintah sudah sangat rendah. Nilai KFDP₁ untuk ke-4 (empat) Provinsi lainnya masih mendekati nilai 1, hal ini berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi.

6). Indikator Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Indikator PAD sangatlah strategis dalam pembangunan wilayah khususnya membangun kemandirian dan otonomi pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. Selain formulasi dan rasio yang telah disebutkan dapat dikembangkan lagi ukuran dalam menilai kinerja PAD, diantaranya:

- Perbandingan PAD dengan pengeluaran total
- Perbandingan PAD dengan pengeluaran rutin
- Perbandingan PAD + Bagi hasil pengeluaran total
- Perbandingan PAD + Bagi hasil pengeluaran rutin
- Perbandingan PAD Per Kapita dengan Pengeluaran Rutin Per Kapita
- Perbandingan PAD Per Kapita dengan Pengeluaran Total Per Kapita

7). Elastisitas PAD

Selain itu untuk melihat aspek perubahan PAD terdapat struktur APBD juga dapat dinilai dengan elastisitas PAD, yaitu:

$$e = \frac{\Delta PAD}{\Delta APBD} \text{ Atau } e = \frac{\Delta PAD}{\Delta PDRB}$$

keterangan:

e = elastisitas PAD dalam keuangan daerah atau terhadap PDRB

Δ PAD = perubahan nilai PAD pada dua skala yang berbeda

Δ APBD = perubahan nilai APBD pada dua skala yang berbeda

Δ PDRB = perubahan nilai PDRB pada dua skala yang berbeda

Tabel 2.8. Penghitungan Elastitas PAD Provinsi Lampung
Tahun 2018-2019

Tahun	PAD (Juta Rupiah)	PDRB (Milyar Rupiah)	Elastisitas PAD
2018	2,864,235	232,207.68	12.58%
2019	3,018,067	244,436.79	

Sumber: DJPK dan BPS

Elastisitas PAD Provinsi Lampung sebesar 12,58 persen. Semakin tinggi nilai elastisitas PAD suatu daerah maka semakin baik pula peran dan perubahan nilai PAD terhadap APBD ataupun PDRB.

Dengan menggunakan kriteria *share* and *growth*, kemampuan PAD suatu daerah juga dapat dikelompokkan kedalam tipologi berikut:

<i>Share PAD</i>	<i>Growth PAD</i>	
	> rata-rata (tinggi)	< rata-rata (rendah)
> rata-rata (tinggi)	PAD Besar Tumbuh	PAD Besar Stagnan
< rata-rata (rendah)	PAD Kecil Tumbuh	APBD Kecil Stagnan

Sumber: Muta'ali (2015)

Gambar 2.4. Kriteria *Share And Growth*

Keterangan:

$$Share = \frac{PAD}{APBD} \times 100\% \quad Growth = \frac{(PAD_t - PAD_{(t-1)})}{PAD_{(t-1)}} \times 100\%$$

Tabel 2.9. Perhitungan *Share* PAD Provinsi Lampung Tahun 2019

Provinsi	PAD (Rupiah)	APBD (Rupiah)	Share PAD
Jambi	1,651,089,944,335	4,575,192,849,736	36.09
Sumatera Selatan	3,494,510,853,252	9,280,742,072,449	37.65
Bengkulu	826,674,936,050	2,934,057,941,394	28.18
Lampung	3,018,067,291,160	7,266,993,438,828	41.53
Bangka Belitung	826,701,095,332	2,694,205,659,655	30.68

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019, data diolah.

Berdasarkan perhitungan *share* PAD di atas, diketahui bahwa Provinsi Lampung memiliki persentase *share* PAD yang tinggi sebesar 41.53 persen. sedangkan Provinsi dengan nilai *share* PAD yang rendah adalah Provinsi Bengkulu memiliki persentase *share* PAD sebesar 28.18 persen.

Tabel 2.10. Perhitungan *Growth* PAD Provinsi Lampung
Tahun 2018-2019 (Rupiah)

Provinsi	2019	2018	Growth PAD
Jambi	1,651,089,944,335	1,656,569,597,282	(0.33)
Sumatera Selatan	3,494,510,853,252	3,528,010,712,184	(0.95)
Bengkulu	826,674,936,050	872,257,738,966	(5.23)
Lampung	3,018,067,291,160	2,864,235,753,079	5.37
Bangka Belitung	826,701,095,332	850,441,774,831	(2.79)

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019, data diolah.

Berdasarkan perhitungan *growth* PAD di atas, diketahui bahwa hanya Provinsi Lampung memiliki pertumbuhan atau *growth* PAD. Dalam kurun waktu 2 tahun terakhir PAD Provinsi Lampung tumbuh sebesar 5.37 persen. Sedangkan 4 Provinsi lainnya memiliki penurunan atau tidak ada pertumbuhan dalam PAD.

Tabel 2.11. Perbandingan rata-rata *share* PAD dan *Growth* PAD Provinsi Se-Sumbagsel Tahun 2019.

Provinsi	Share PAD	Analisa	Growth PAD	Analisa
Jambi	36.09	< rata-rata rendah	(0.33)	< rata-rata rendah
Sumatera Selatan	37.65	< rata-rata rendah	(0.95)	> rata-rata tinggi
Bengkulu	28.18	> rata-rata tinggi	(5.23)	> rata-rata tinggi
Lampung	41.53	< rata-rata rendah	5.37	< rata-rata rendah
Bangka belitung	30.68	> rata-rata tinggi	(2.79)	> rata-rata tinggi
rata-rata	34.83		(0.79)	

Sumber: DJPK, data diolah

<i>Share PAD</i>	Growth PAD	
	> rata-rata (tinggi)	< rata-rata (rendah)
> rata-rata (tinggi)	PAD Besar Tumbuh Bengkulu Bangka Belitung	PAD Besar Stagnan
< rata-rata (rendah)	PAD Kecil Tumbuh Sumatera Selatan	APBD Kecil Stagnan Jambi Lampung

Sumber: data diolah, 2020

Gambar 2.5. Analisa kriteria *share* and *growth* Provinsi Lampung Tahun 2018-2019.

Berdasarkan kuadran kriteria *share* and *growth* di atas, diketahui bahwa Provinsi Bengkulu dan Provinsi Bangka Belitung berada pada kuadran PAD Besar tumbuh.. Provinsi Jambi dan Provinsi Lampung berada pada kuadran PAD Kecil Stagnan. Sedangkan Provinsi Sumatera Selatan berada pada kuadran PAD Kecil Tumbuh

8). Kinerja Pembangunan

Belanja atau pengeluaran daerah digunakan untuk mengukur seberapa jauh efektifitas pencapaian hasil pembangunan. Secara umum belanja daerah mencakup dua komponen yaitu belanja rutin dan belanja pembangunan. Belanja rutin berupa belanja langsung maupun belanja tidak langsung. Sedangkan belanja pembangunan

berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan public menurut kepentingan sektor pembangunan.

Dengan demikian, semakin tinggi dana APBD yang digunakan untuk pembangunan maka semakin tinggi kinerja pembangunan daerah. sebaliknya semakin banyak dana yang digunakan untuk belanja pegawai maka semakin rendah keinerja pembangunan. Berikut formulasi dalam 2 ukuran:

$$KPD_1 = \frac{BP}{TP}$$

$$KPD_2 = \frac{BP}{BR}$$

Keterangan:

KPD_1 = Kinerja Pembangunan Daerah (model pertama)

KPD_2 = Kinerja Pembangunan Daerah (model kedua)

BP = Belanja Pembangunan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat yaitu belanja pelayanan publik.

BR = Belanja Rutin (Belanja Pegawai, Belanja Barang, Biaya Pemeliharaan, Biaya Perjalanan Dinas, Belanja Lain-Lain)

TP = Total Pengeluaran atau Total Belanja Daerah

Nilai kinerja Pembangunan Daerah (KPD) berkisar antara 0-1. Jika mendekati nilai 1 maka semakin tinggi kinerja pembangunan karena semakin banyak alokasi belanja daerah untuk pembangunan. Berikut klasifikasinya

Tabel 2.12. Klasifikasi Kinerja Pembiayaan Pembangunan Wilayah

Klasifikasi	KPD ₁	KPD ₂
Sangat Tinggi	> 0,5	> 0,75
Tinggi	0,5-0,36	0,51-0,75
Rendah	0,35-0,20	0,25-0,50
Sangat Rendah	< 0,20	< 0,25

Sumber: data diolah, 2020

Tabel 2.13. Perkembangan Belanja Pembangunan dan Total Belanja Daerah Provinsi Se-Sumbagsel Tahun 2019 (Dalam Rupiah)

Provinsi	Belanja Pembangunan (Modal)	Total Belanja Daerah	KPD ₁
Jambi	866,500,805,931	4,824,366,351,413	0.18
Sumatera Selatan	1,606,219,507,432	9,618,074,513,841	0.17
Bengkulu	741,823,063,584	3,118,303,518,797	0.24
Lampung	1,014,037,524,021	7,058,713,889,024	0.14
Bangka belitung	441,201,203,551	2,776,076,365,845	0.16

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Pada Tabel 2.13, belanja pembangunan dicerminkan dengan belanja modal. Belanja modal merupakan pos akun belanja langsung di dalam laporan anggaran pendapatan dan belanja daerah (LRA). Berdasarkan PP No. 12 Tahun 2019, belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

Provinsi sumatera selatan adalah provinsi dengan alokasi belanja modal tertinggi dan Provinsi dengan alokasi belanja modal

terendah adalah Provinsi Bangka Belitung. Berdasarkan penghitungan KPD₁ atau nilai kinerja pembangunan daerah, ke-5 (lima) Provinsi Se-Sumbagsel memiliki klasifikasi kinerja pembangunan yang masih sangat rendah. Diharapkan kepada pemerintah untuk memperbesar porsi alokasi belanja yang bersifat pengadaan dan pembangunan karena akan berdampak pada kemajuan suatu daerah.

Data belanja pembangunan untuk sektoral, misalnya untuk sektor permukiman, pendidikan, kesehatan, pertanian, dapat digunakan untuk mengetahui keberhasilan atau kinerja pembangunan sektor tersebut. Intensitas belanja pembangunan juga dapat dibandingkan posisi variabel kunci lainnya seperti jumlah penduduk, luas wilayah dan sebagainya. Contoh formulasinya sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Pembangunan Per Kapita} = \frac{\text{Total Belanja Pembangunan (Rp)}}{\text{Jumlah Penduduk}}$$

$$\text{Distribusi Belanja Pembangunan Per Wilayah} = \frac{\text{Total Belanja Pembangunan (Rp)}}{\text{Luas Wilayah}}$$

9). Efisiensi dan Efektivitas Keuangan Daerah

Efisiensi keuangan daerah adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah. dalam melakukan fungsi pelayanan publik, maka pemerintah harus mampu menyeimbangkan antara penerimaan dan pengeluaran atau terjadi kesuaian diantara keduanya. Pengeluaran sama atau mendekati penerimaan. Formulasinya sebagai berikut:

1. Rasio Efektivitas

Pengukuran tingkat efektivitas ini dilakukan untuk mengetahui berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan anggaran yang memerlukan data realisasi pendapatan dan target pendapatan. Berikut formulasinya:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Target Pendapatan}}$$

2. Rasio Efisiensi

Pengukuran tingkat efisiensi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar efisiensi dari pelaksanaan kegiatan dengan mengukur input yang digunakan dengan output yang dihasilkan. Berikut formulasinya:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Pengeluaran Belanja}}{\text{Pendapatan}}$$

Menurut Kemendagri, Nilai Efektivitas dan Efisiensi Keuangan Daerah dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 2.14. Klasifikasi Rasio Efektivitas

Rasio Efektivitas	
Klasifikasi	Kriteria
> 1	Sangat Efektif
0,9 – 1,0	Efektif
0,8 – 0,9	Cukup Efektif
0,6 – 0,8	Kurang Efektif
< 0,6	Tidak Efektif

Sumber: Muta'ali (2015)

Tabel 2.15. Klasifikasi Rasio Efisiensi

Rasio Efisiensi	
Klasifikasi	Kriteria
> 1	Tidak Efisiensi
0,9 – 1,0	Kurang Efisien
0,8 – 0,9	Cukup Efisien
0,6 – 0,8	Efisien
< 0,6	Sangat Efisien

Sumber: Muta'ali (2015)

Kinerja keuangan daerah tidak efisien karena pengeluaran melebihi penerimaan daerah. jika tidak efisien maka keuangan daerah menjadi defisit sehingga mengharuskan daerah untuk meminjam dana atau mengambil APBD tahun berikutnya. Sebaliknya kinerja keuangan daerah yang kurang efisien karena pengeluaran lebih kecil dari penerimaan daerah. pada kondisi kurang efisien, maka keuangan daerah menjadi surplus. Keadaan ini dimungkinkan rendahnya daya serap dan realisasi kegiatan pembangunan yang akan berakibat pada kegiatan pembangunan yang tidak berjalan maksimal.

Tabel 2.16 Perhitungan Rasio Efektivitas Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2017-2019

Tahun	Realisasi Pendapatan	Target Pendapatan	Rasio Efektivitas
2017	9,280,742,072,449	9,660,923,645,962	0.96
2018	9,141,371,395,100	6,865,580,106,642	1.33
2019	8,195,968,131,800	8,195,110,542,121	1.00

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Berdasarkan hasil penghitungan di atas dapat diketahui bahwa rasio efektivitas di Provinsi Sumatera Selatan memiliki nilai yang berkisar 0.9 sampai > 1. Pada tahun 2017 memiliki kriteria Efektif. Sedangkan tahun 2018 dan 2019 memiliki kriteria sangat efektif. Hal ini mengindikasikan Provinsi Sumatera Selatan secara agregat berhasil dalam pencapaian tujuan anggaran.

Tabel 2.17 Perhitungan Rasio Efisiensi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017-2019 (Rupiah)

Tahun	Pengeluaran Belanja	Realisasi Pendapatan	Rasio Efisiensi
2017	6,409,382,404,458	9,280,742,072,449	0.69
2018	7,941,143,670,102	9,141,371,395,100	0.87
2019	9,618,074,513,841	8,195,968,131,800	1.17

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Data diolah.

Berdasarkan hasil penghitungan di atas, rasio efisiensi di Provinsi Sumatera Selatan memiliki nilai yang berkisar 0.6 sampai > 1. Pada tahun 2017 memiliki kriteria Efisien. Sedangkan tahun 2018 memiliki kriteria Cukup Efisien. Tahun 2019 rasio efisiensi memiliki nilai 1.17, hal ini mengindikasikan berada pada kriteria tidak efisien karena pengeluaran belanja lebih besar daripada pendapatan.

10). Rasio Aktivitas

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang

dialokasikan untuk belanja rutin, maka persentase belanja investasi yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Secara sederhana, rasio aktivitas dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total APBN}}$$

$$\text{Rasio Belanja Pembangunan Terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Pembangunan}}{\text{Total APBN}}$$

Dalam menghitung rasio ini belum ada ketentuan tolok ukur yang dijadikan dalam perhitungannya. Hal ini dikarenakan adanya dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan. Namun, sebagai daerah di negara berkembang, peranan pemerintah daerah untuk memacu pelaksanaan pembangunan masih relative besar. Oleh karena itu, rasio belanja pembangunan masih perlu ditingkatkan dengan memperhatikan kebutuhan pembangunan di daerah.

Tabel 2.18. Perhitungan Rasio Belanja Pembangunan Terhadap APBD Provinsi Se-Sumbagsel Tahun 2019 (Dalam Rupiah).

Provinsi	Belanja Modal	APBD	Rasio Belanja Pembangunan Terhadap APBD
Jambi	866,500,805,931	4,575,192,849,736	0.2
Sumatera Selatan	1,606,219,507,432	9,280,742,072,449	0.2
Bengkulu	741,823,063,584	2,934,057,941,394	0.3
Lampung	1,014,037,524,021	7,266,993,438,828	0.1
Bangka belitung	441,201,203,551	2,694,205,659,655	0.2

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Data diolah.

Dari perhitungan Tabel 2.18 diketahui bahwa Rasio Belanja Pembangunan terhadap APBD Provinsi Se-Sumbagsel berkisar antara 0.0 sampai 0.3. Provinsi yang memiliki rasio tertinggi adalah Provinsi Bengkulu. Sedangkan Provinsi yang memiliki rasio terendah adalah Provinsi Lampung. Provinsi Jambi, Sumatera Selatan dan Provinsi Bangka Belitung memiliki Rasio Belanja Pembangunan terhadap APBD dengan nilai yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Halim, A. (2012). Akuntansi Keuangan Daerah. *Jakarta: Salemba Empat*.
- Halim, Abdul. (2007). Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. *Jakarta: Salemba Empat*.
- Halim, Abdul. (2017). Pengelolaan Keuangan Daerah. *UPP STIM YKPN*.
- Mardiasmo. (2005). Pengelolaan Keuangan Daerah/PKD, Workshop Implikasi PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. *MEP UGM: Yogyakarta*.
- Muta'ali, L. (2015). Teknik Analisis Regional. *BPFG Universitas Gadjah Mada: Yogyakarta*.
- Nataluddin. (2001). Potensi dana perimbangan daerah pada pemerintah daerah di Propinsi Jambi. *Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP YKPN*.
- Sularso, H., & Restianto, Y. E. (2011). Pengaruh kinerja keuangan terhadap alokasi belanja modal dan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Tengah. *Media Riset Akuntansi, Vo. 1 No.*, Hal 109-124.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.

INDIKATOR PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH : TINJAUAN TEORITIS DAN EMPIRIS

ORIGINALITY REPORT

4%

SIMILARITY INDEX

4%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

eprints.unsri.ac.id

Internet Source

2%

2

doku.pub

Internet Source

2%

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On